

ANALISIS KINERJA EKONOMI DAERAH HASIL PEMEKARAN (STUDI KOMPARATIF KABUPATEN PASAMAN BARAT, DHARMASRAYA, SOLOK SELATAN)

*Analysis of Regional Economic Performance Results of Expansion
(Comparative Study of West Pasaman, Dharmasraya, South Solok Regencies)*

Rodhiyah¹, Weni Lestari²

BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman Barat, rodhiyahyah@gmail.com¹
Balitbangda Provinsi Jambi, Jl.R.M.Nur Atmadibrata No.1A Telanaipura, wenilestari@gmail.com²

Diterima : 10 Oktober 2023; Direvisi: 1 November 2023.; Disetujui : 30 November 2023

DOI : <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.222>

Abstract

This research aims to compare the economic performance of three regencies that have been expanded and have their own regional autonomy. Regional Autonomy is implemented so that regions can explore regional potential and be independent in managing existing resources. One way to achieve local autonomy is to give regions the power to expand as part of a collective effort. After regional expansion, regions are required to be able to overcome their economic problems, such as increasing economic growth, reducing poverty rates, reducing unemployment rates, improving income distribution, and reducing development inequality. This research aims to see how far the regions resulting from this expansion have developed. An evaluation was carried out by measuring the Economic Performance Index (IKE) in the three districts resulting from the expansion, namely West Pasaman Regency, Dharmasraya regency, and South Solok regency. The economic performance index is calculated using the average economic growth rate, the ratio of district GDP to national GDP, per capita GDP rate, and poverty rate. Secondary data and descriptive analysis are used in this study. The research results show that Dharmasraya district is a district with a better economic performance index than West Pasaman district and South Solok district.

Keywords : Economic Growth, Performance, Regional Autonomy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja ekonomi tiga daerah kabupaten yang dimekarkan dan memiliki otonomi daerahnya masing-masing. Otonomi daerah dilaksanakan agar daerah dapat menggali potensi wilayahnya dan secara mandiri mengawasi sumber daya yang ada. Salah satu kebijakan atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah dengan diberikannya kewenangan bagi daerah untuk melakukan pemekaran sebagai bagian dalam aspirasi masyarakat. Undang-undang nomor 38 tahun 2003 menetapkan bahwa Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dimekarkan menjadi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, sementara Kabupaten Solok dimekarkan menjadi Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Setelah pemekaran wilayah, daerah harus mampu mengatasi permasalahan perekonomiannya sendiri seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan. Penelitian ini melihat sejauh mana daerah-daerah hasil pemekaran ini berkembang, dilakukan evaluasi melalui pengukuran Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) pada ketiga kabupaten hasil pemekaran, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi, rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi, Laju PDRB perkapita dan tingkat kemiskinan adalah komponen yang membentuk indeks kinerja perekonomian. Data sekunder digunakan untuk penelitian ini melalui analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten dengan indeks kinerja perekonomian yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan.

Kata Kunci : Kinerja, Otonomi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah. Atas dasar tersebut setiap daerah wajib melaksanakan otonomi daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab untuk mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat daerah itu sendiri. Banyak kabupaten dan kota yang terbentuk sebagai akibat dari penerapan otonomi daerah. Ini termasuk Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran ketiga kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Di mana pemekaran dilaksanakan atas pertimbangan kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien, timpangnya pemerataan, dan iming-iming insentif fiskal dan status kekuasaan.

Beberapa daerah otonomi baru yang berhasil setelah dilakukan pemekaran wilayah yaitu Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah otonomi baru paling berhasil di Indonesia karena paling cepat pemenuhan sarana dan prasarana wilayahnya. Kabupaten Kayong Utara saat pertama kali dimekarkan cukup memprihatinkan, namun kini menjadi daerah yang cukup maju dan berkembang. Kabupaten Ketapang yang menjadi daerah induk juga makin pesat pembangunannya. Hal inilah yang perlu dicontoh bagi daerah lain di Indonesia, daerah induk dan daerah pemekaran sama-sama cepat kemajuannya, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan warganya masing-masing.

Sebagai wilayah hasil pemekaran, tentu saja ketiga kabupaten ini perlu melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat perekonomian, menyediakan barang publik, memberdayakan dan mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia serta memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam (Badrudin, 2012).

Salah satu tujuan pembangunan yang harus dijalankan setiap pemerintah daerah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini juga menjadi kewajiban daerah hasil pemekaran sebagai bentuk penilaian terhadap

keberhasilan pembangunan ekonomi. Dari ketiga kabupaten hasil pemekaran ini, kabupaten manakah yang memiliki kinerja ekonomi lebih baik, dilihat dari Indeks Kinerja Ekonomi (IKE). Adapun manfaat penelitian ini dapat dijadikan bahan saran dan perbaikan bagi tiga kabupaten pemekaran untuk terus meningkatkan kinerja ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja ekonomi antara tiga kabupaten yang dimekarkan bersama dan melaksanakan otonomi daerah.

LANDASAN TEORI

Konsep Otonomi Daerah dan Pemekaran Daerah

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari ketimpangan distribusi pendapatan (Amri, 2017). Otonomi daerah harus dilakukan untuk mencapai pemerataan pembangunan hingga ke bawah, hal ini memungkinkan daerah untuk mengeksplor sumber dayanya sendiri dan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri. Setelah reformasi, otonomi daerah diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan manusia (Aziza & Srimarchea, 2023).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, daerah memiliki kebebasan untuk membentuk wilayah baru melalui pemekaran dan penggabungan wilayah sebelumnya. Pemekaran daerah menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 berupa pemecahan suatu provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih wilayah baru atau penggabungan sebagian wilayah tetangga dalam 1 (satu) wilayah provinsi menjadi satu wilayah baru. Pemekaran tersebut diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang, menunjukkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan (Darwin Lie, dkk, 2022). Pertumbuhan ekonomi dalam seri ekonomi makro tentang teori pertumbuhan ekonomi, yaitu sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara terus menerus pada suatu negara untuk berkembang ke arah yang dianggap lebih baik dalam jangka waktu tertentu (Patta & Sukarno, 2017). Subekti (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai

perkembangan kegiatan ekonomi yang menghasilkan peningkatan produk dan jasa yang diproduksi masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah alat yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan fenomena *trickle down effect* (efek meresap ke bawah), dimana pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan karena perubahan ekonomi (GS Ahmad Daengs, 2020), (Sahri, 2012). Pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan yang dibentuk oleh beberapa sektor perekonomian, menggambarkan laju pertumbuhan yang terjadi secara tidak langsung dan digunakan sebagai alat ukur bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan proses pembangunan (Alisha & Yulhendri, 2021), (Subekti, 2023).

Berdasarkan pengertian tentang pembangunan ekonomi tersebut, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui pola pembangunan setiap gara atau suatu wilayah.

Konsep Kemiskinan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat (2020) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep kemiskinan tersebut sejalan dengan Kuncoro (2006) bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum. Seperti yang dinyatakan oleh Kartasmita dalam Wrihatnolo (2011), kemiskinan adalah masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang berujung pada kesenjangan. Tidak adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh kekuatan sosial yang mendasar adalah penyebab kemiskinan menurut Friedmann dalam Wrihatnolo (2011) Tujuan dari pengentasan kemiskinan adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur Royat (2015).

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.

Penelitian Sebelumnya

Studi komparatif daerah-daerah pemekaran telah dilakukan oleh banyak peneliti, salah satunya Yulianita (2013) Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Muara Enim

(Kota Induk) dengan Kota Prabumulih (Kota Baru) enunjukkan bahwa Kota Prabumulih telah mengalami perubahan.

Analisis Indeks Ekonomi Daerah menunjukkan bahwa Kota Prabumulih masih belum sebaik daerah Induknya. Studi lainnya tentang pemekaran daerah terhadap perkembangan ekonomi dan bagaimana kinerja Kabupaten Solok ditulis oleh Hidayat, et.al (2020). Analisis menunjukkan bahwa IKE, Indikator Kinerja Keuangan Daerah (IKKPD), Indikator Kinerja Pelayanan Publik (IKPD) dan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (IKA) Kabupaten Solok setelah pemekaran lebih besar daripada sebelum pemekaran, menunjukkan bahwa pemekaran Kabupaten Solok memberikan dampak positif. Namun, hanya IKE dan IKA Kabupaten Solok yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Solok Selatan Selain itu, Endaryanto et al (2018) melakukan penelitian tentang penilaian kinerja ekonomi dan keuangan Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa kabupaten pemekaran memiliki kinerja ekonomi dan keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten induk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana pada tahap pertama mengkaji perkembangan kinerja ekonomi daerah, menggunakan rangkaian waktu dari tahun 2011 hingga

2022 dari Badan Pusat Statistik sebagai data sekunder. Data dikumpulkan dari publikasi seperti jurnal penelitian, buku, dan internet.

Alat Analisis Masalah

Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil perkembangan ekonomi daerah pemekaran. IKE merupakan indikator intuitif untuk menilai dinamika kinerja ekonomi suatu Negara dalam perspektif historis (Vadim Khramov, Lee R, 2013). Menurut Bappenas dan UNDP (2008) metrik berikut digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi daerah yaitu pertumbuhan PDRB non-migas (ECGI), PDRB perkapita (WELFI), rasio PDRB Kabupaten Terhadap PDRB provinsi (ERRI), dan angka Kemiskinan (POVEI). Untuk kabupaten *i* di tahun *t*, indeks kinerja ekonomi daerah adalah kombinasi dari keempat indicator tersebut.

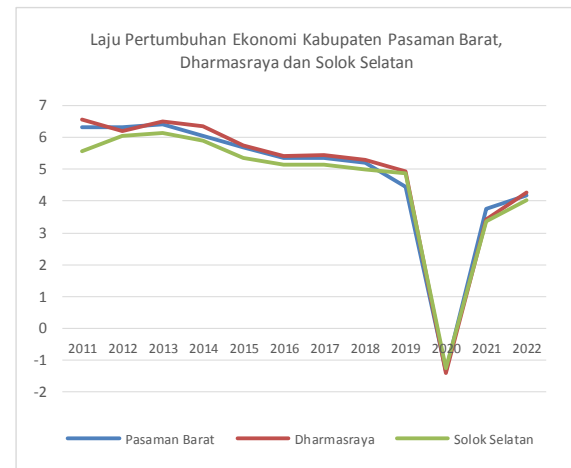
$$IKE_{i,t} = \frac{ECGI_{i,t} + WELFI_{i,t} + ERRI_{i,t} + (100 - POVEI_{i,t})}{4}$$

- Di mana :
- $IKE_{i,t}$ = Indeks Kinerja Ekonomi
 - $ECGI$ = Pertumbuhan PDRB non-migas (%)
 - $WELFI$ = Laju PDRB per kapita (%)
 - $ERRI$ = Rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi (%)
 - $POVEI$ = Angka kemiskinan (%)
 - i = Kabupaten
 - t = Tahun

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya dan Solok Selatan menjadi wilayah kabupaten baru yang diberi otonomi. Ketiga kabupaten ini berlomba-lomba menjalankan roda pemerintahannya sendiri, termasuk memperbaiki kondisi ekonomi daerah seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, menekan inflasi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kualitas pembangunan manusia, dan merubah struktur ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok Selatan mengalami trend yang sama. Pada periode tahun 2011 hingga 2022 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, terutama pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi ketiga kabupaten tersebut mencapai angka negatif. Hal ini dikarenakan adanya covid 2019 yang dialami seluruh wilayah Indonesia. Dari tahun 2011 hingga 2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi Dharmasraya lebih unggul dari dua kabupaten lainnya yaitu sebesar 4,89 sementara pertumbuhan ekonomi rata-rata Kabupaten Pasaman Barat sebesar 4,81 dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan rata-rata sebesar 4,60.



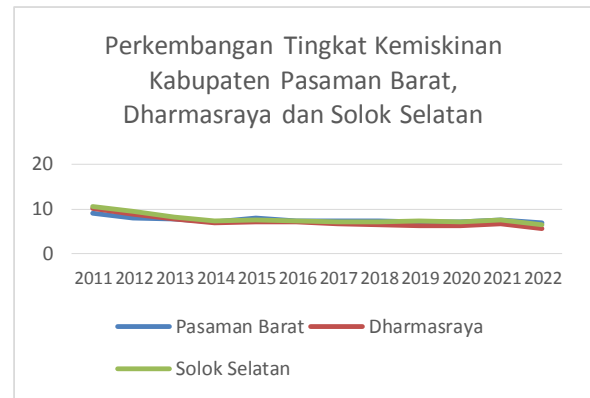
Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2022 Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya dan Solok Selatan

Pendapatan rata-rata masyarakat suatu wilayah juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja ekonominya. Secara keseluruhan, PDRB per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita atau PDRB per satu orang penduduk ditunjukkan atas dasar harga berlaku (BPS Sumbar, 2022).

Berdasarkan data yang dihimpun BPS, kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2011 hingga 2022 adalah Kabupaten Dharmasraya yaitu sebesar Rp 28.965,24 (ribu), kemudian disusul oleh Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp 23.747,82 (ribu) dan kabupaten Solok Selatan sebesar Rp 20.803,27 (ribu). Ketika PDRB per kapita meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, dan sebaliknya.

Untuk membandingkan perkembangan ekonomi suatu daerah dengan daerah lain dalam satu wilayah provinsi digunakan rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi. Semakin tinggi rasio, semakin baik perkembangan ekonomi daerah tersebut, dan sebaliknya. Kabupaten Dharmasraya memiliki rasio PDRB tertinggi sebesar 102,89%, Kabupaten Pasaman Barat sebesar 84,39% dan Kabupaten Solok Selatan sebesar 74,11%.

Selain ketiga indikator di atas, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dinilai dari tingkat kemiskinan. Semakin rendah tingkat kemiskinan sebuah wilayah, semakin baik ekonominya dan sebaliknya (Purnama, 2017). Tingkat kemiskinan paling tinggi diduduki oleh Kabupaten Solok Selatan dengan rata-rata tingkat kemiskinan dari tahun 2011-2022 sebesar 7,75%, sedangkan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 7,55% dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 6,34%. Pada Gambar 2 terlihat perkembangan tingkat kemiskinan pada tiga kabupaten ini. Dari tahun 2011 hingga 2022 tingkat kemiskinan mengalami trend penurunan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemekaran dan tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dengan salah satu indikatornya adalah penurunan tingkat kemiskinan.



Gambar 2. Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya dan Solok Selatan.

Kinerja ekonomi daerah merupakan alat evaluasi untuk mengukur perkembangan atas indikator-indikator makro pembangunan ekonomi. Evaluasi atas kinerja ekonomi dapat menggambarkan penyelesaian atas masalah ekonomi makro, seperti adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, adanya penurunan tingkat kemiskinan, adanya penurunan angka pengangguran, adanya peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Fokus kinerja ekonomi pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kondisi ekonomi suatu wilayah berkembang setelah pemekaran. Pada tahun 2008, pendekatan IKE digunakan oleh Bappenas dan UNDP untuk mengevaluasi dampak pemekaran wilayah. Hasil perhitungan IKE Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya dan Solok Selatan, ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya dan Solok Selatan

Tahun	Pasaman Barat	Dharmasraya	Solok Selatan
2011	46,98	54,09	44,02
2012	47,04	51,58	44,40
2013	47,01	51,53	44,64
2014	46,88	51,41	44,64
2015	46,38	50,86	44,22
2016	46,18	50,44	44,00
2017	46,06	50,15	43,92
2018	45,84	49,83	43,77
2019	44,89	48,59	43,22
2020	44,95	52,05	39,13
2021	45,97	51,15	41,77
2022	46,22	51,86	42,14

Sumber : Data diolah

Dari hasil olahan data di atas, IKE tiga kabupaten ini mengalami fluktuatif selama 12 tahun yaitu dari tahun 2011 hingga 2022. IKE Pasaman Barat dan Dharmasraya yang paling rendah berada pada tahun 2019, sementara IKE Solok Selatan yang paling rendah berada pada tahun 2020. Rata-rata IKE Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar 46,20, kabupaten Dharmasraya sebesar 50,93, sedangkan kabupaten Solok Selatan sebesar 43,32. Kabupaten Dharmasraya lebih unggul dari dua kabupaten lainnya untuk keempat indikator kinerja ekonomi. Artinya sesudah diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Dharmasraya memiliki kemandirian keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan sosial masyarakat yang lebih baik dari dua kabupaten lainnya.

Ketiga kabupaten tersebut dapat meningkatkan nilai IKE masing-masing dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan PAD kabupaten masing-masing. Masih banyak objek pajak yang belum tertibkan untuk menaikkan tingkat pendapatan daerah. Disamping itu proporsi belanja daerah perlu diperhatikan antara belanja rutin dan belanja pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dibandingkan dengan dua kabupaten lain yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten dengan kinerja perekonomian terbaik dari Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan.

Diperlukan upaya yang serius agar kinerja ekonomi daerah pemekaran berkembang pesat sesuai dengan amanat pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan. Kabupaten hasil pemekaran diharapkan lebih inovatif dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan di daerahnya.

KETERBATASAN PENELITIAN

Data penelitian yang digunakan masih terbatas, indeks yang dihitung belum mampu menjelaskan rentang nilai persentase yang diperoleh, dan belum mampu menggambarkan sudah terjadi perkembangan ekonomi setelah pemekaran atau tidak jika dibandingkan dengan daerah induknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Lia. (2007). *Ekonomi Pembangunan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Amri, Khairul. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan. Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* 1(1): 1-11. DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v1i1.22>
- Alisha, Wyanet Putri., Yulhendri. (2021). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera Barat*. *Ecogen* Vol. 4 No. 4. <http://repository.unp.ac.id/33457/>
- Aziza, T.N., & Srimarchea, D.W. (2023). Penanganan Daerah Tertinggal di Indonesia. *Khazanah Intelektual* 7(1).1584-1600. DOI: <https://doi.org/10.37250/khazanah.v7i1.185>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. (2021). *Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2021*.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. (2022). *PDRB per kapita menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2020-2022*. <https://sumbar.go.id>
- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Darwin Lie, S.Ee., et al. *Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi*. CV. Azka Pustaka.
- Endaryanto, Teguh., Firdaus, Muhammad., Siregar, Hermanto & Hakim, Dedi Budiman. (2018). Analisis kinerja ekonomi dan keuangan daerah di Provinsi Lampung. *Sosiohumaniora – Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 20 No. 1 Maret 2018. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/9501/8333>
- GS, Achmad Daengs. (2020). *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*. Unitomo Press. Surabaya.
- Hidayat, Fardian., Noer, Melinda., & Adrimas. (2020). Analisis pemekaran daerah terhadap perkembangan perekonomian dan kinerja pemerintah daerah induk kabupaten Solok. *Menara Ilmu* Vol. XIV No. 01 Oktober 2020. <https://doi.org/10.1037/ppm000185>
- Muhammad, Sahri. (2012). *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Paradigma Zakat*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Khramov, Vadim. & Lee, J. R. (2013). *The economic performance index (EPI) : an intuitive indicator for assessing a country's economic performance dynamics in an historical perspective*. IMF Working Papers. <https://www.imf.org/en/Publications/>

- WP/Issues/2016/12/31/The-Economic-Performance-Index-EPI-an-Intuitive-Indicator-for-Assessing-a-Country-s-Economic-41005
- Kuncoro, Mudrajat. (2006). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Patta Rapanna & Zulfikry Sukarno, 2017. *Ekonomi Pembangunan Vol 1*. CV Sah Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Purnama, Nadia Ika. (2017). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara*. Institute for Development and Policy Study. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i1.1181>
- Royat, Sujana. (2015). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Menko Kesejahteraan Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- Subekti, A.T. (2023). Analysis of The Influence of Inflation on Growth Rate Economy In Jambi City. *Jurnal Khazanah Intelektual* 7(2) Hal. 1750-1763. <https://doi.org/10.37250/khazanah.v7i2.200>
- Sukirno, Sadono. (2001). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wrihatnolo, Randy R. (2011). *Problematika kemiskinan dan orientasi penanggulangan kemiskinan*. Institute for Development and Policy Study.
- Yulianita, Anna. (2013). Analisis kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Muara Enim (kota Induk) dengan Kota Prabumulih (kota baru). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 01 Juni 2013*. <https://dx.doi.org/10.29259/jep.v11i1.4910>